

TAJUK RENCANA

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

JELANG akhir tahun, DIY diserbu pengunjung dari luar provinsi. Okupansi hotel pun meningkat tajam, bahkan sudah banyak yang dipesan untuk merayakan akhir tahun atau sekadar berlibur di Yogya. Ini fenomena wajar yang terjadi hampir setiap tahun. Sayangnya, jelang akhir tahun 2022 ini, pandemi Covid-19 belum berakhir, bahkan trennya cenderung meningkat. Angka kematian akibat Covid-19 pun masih tinggi.

Pemda DIY agaknya sudah mengantisipasi hal ini. Pemda DIY telah meminta rumah sakit untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. Sebab, berdasar pengalaman selama ini, setiap libur akhir tahun/Natal akan banyak kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Inilah yang harus diantisipasi sejak sekarang.

Meski sejauh ini belum ada pengamatan dalam penerapan protokol kesehatan (prokes), namun alangkah baiknya bila Pemda sudah mengantisipasi sejak sekarang. Satgas Covid-19 di tingkat kampung/kelurahan diaktifkan kembali guna mencegah penyebaran Covid-19, terutama subvarian XBB yang belakangan merebak di sejumlah wilayah.

Intinya, kita tak boleh lengah, karena pandemi belum berakhir, bahkan kasusnya cenderung naik. Selain perlunya kesiapsiagaan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan di DIY, pengelola destinasi wisata harus tegas dan konsisten, tak boleh menerima kunjungan wisatawan di atas kapasitas 100 persen.

Tak hanya itu, pengelola destinasi wisata juga dianjurkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk kepentingan skrening pengunjung, sehingga mudah melacak bila

terjadi kasus Covid-19. Pengelolaan tempat wisata harus memenuhi syarat standar protokol kesehatan, sehingga memberi rasa aman pada pengunjung.

Kalau mau jujur, sebenarnya banyak anggota masyarakat yang sudah abai terhadap prokes. Mereka menganggap serangan Covid-19 tidak serius dan tidak menimbulkan dampak mematikan. Padahal, berdasar angka nasional, kematian akibat Covid-19 perhari mencapai 50-60 kasus, angka yang cukup tinggi.

Kiranya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan Yogya yang aman dan sehat, terbebas dari paparan Covid-19. Upaya ini memang membutuhkan kesadaran bersama, namun tetap harus ada mekanisme sanksi bila prokes dilanggar. Tentu kita tak ingin kondisi darurat terulang seperti dulu, ketika pasien Covid-19 tidak tertampung di rumah sakit, sehingga harus dirawat di luar ruangan dengan mendirikan tenda-tenda darurat.

Antisipasi tak boleh terlambat, karena ancaman sudah di depan mata. Mengabaikan ancaman Covid-19, terutama subvarian baru XBB, tidaklah bijak, bahkan kontraproduktif. Lebih baik kita menahan diri untuk terbebas dari mengenakan masker, sebab alat sederhana ini terbukti mampu mencegah berbagai serangan penyakit, termasuk Covid-19.

Kita tak ingin lagi kecolongan. Apalagi, pemerintah kini telah memberlakukan lagi PP-KM level 1 di seluruh wilayah Indonesia mulai 8 November hingga 21 November 2022. Ini artinya, pandemi belum berakhir sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat untuk tidak mengabaikan prokes. □-d

Suara Lain yang Perlu Didengar Muktamar

KEPEMIMPINAN Muhammadiyah adalah kolejial. Meski demikian, persoalan kepemimpinan tetap mendominasi perhatian banyak pihak. Forum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM), sebuah forum tidak resmi, cukup antusias membicarakan kepemimpinan Muhammadiyah mendatang. Suara lain dari warga Persyarikatan maupun pemerhati Muhammadiyah mencoba memberikan masukan tentang hal yang sama.

Dari mereka ini muncul beberapa keinginan, terkait dengan aspek: pertama, komposisi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2022-2027 hendaknya menganut prinsip proporsional (keterwakilan) Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara dan Papua. Komposisi yang tidak hanya merefleksikan bidang program Persyarikatan yang melembaga dalam Majelis, tetapi juga merepresentasikan kawasan daerah pembinaan.

Dikenal Persoalannya, tidak semua tokoh dari kawasan yang dimaksud dikenal dan memiliki kompetensi seperti yang dibutuhkan. Sehingga, seringkali terjadi bahwa yang dipilih untuk duduk di kepemimpinan PP Muhammadiyah adalah mereka yang selama ini sudah aktif di Pimpinan Pusat. Warga Persyarikatan mudah mengenal melalui "siapa yang datang engkau yang aku kenal." Jalur ini menentukan pilihan utusan peserta Muktamar, terhadap figur kepemimpinan PP Muhammadiyah.

Karena itu jalur tatap muka dengan warga Persyarikatan di daerah-daerah menjadi sangat penting bagi sebagian calon yang ingin terpilih. Karena tatap muka menjadi faktor sangat penting, sebagian calon yang masuk nominator 39, memanfaatkan betul saat khutbah atau ceramah di masjid tempat acara Muktamar berlangsung.

Kedua, masa jabatan Ketua Umum dan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tetap dijabat maksimal 2 (dua) kali masa jabatan. Sedangkan, jabatan Keanggotaan atau Ketua Pimpinan Pusat maksi-

Achmad Jainuri

mal 3 (tiga) periode agar terjadi regenerasi kepemimpinan. Keanggotaan Pimpinan perlu dibatasi. Jangan karena tiadanya ketentuan, menjadi tidak terbatas masanya.

Ketiga, evaluasi kinerja anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Evaluasi ini



dilakukan peserta Muktamar sebagai salah satu persyaratan seorang calon pimpinan untuk dipilih atau tidak dipilih kembali. Karena mekanisme organisasi belum menetapkan adanya evaluasi ini, Forum PWM menetapkan evaluasi kinerja menjadi salah satu kriteria bagi seorang calon itu layak atau tidak untuk dipilih kembali.

Keempat, mengingat luasnya Wilayah Indonesia dan semakin meningkatnya amal usaha, diperlukan Koordinator Wilayah dalam kepemimpinan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2022-2027. Keinginan ini sangat berkaitan dengan poin pertama dan ketiga. Tanggung jawab pembinaan selain per-bidang atau Majelis juga dikombinasikan per-kawasan.

Kelima, batasan umur Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak boleh lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun. Meskipun, as-

pek keinginan yang lain seperti disebutkan di atas berdampak juga pada sebagian incumbents yang masih aktif di jajaran kepemimpinan PP Muhammadiyah sekarang, tetapi batasan usia menjadi aspek krusial yang masih berlangsung pembicaraan di kalangan peserta Forum PWM sampai sekarang.

Pertanyaan

Beberapa pertanyaan muncul: tujuh puluh tahun tetapi sangat aktif dan produktif di kepemimpinan. Tujuh puluh tahun dan sudah berada di jajaran kepemimpinan selama lebih tiga periode. Tujuh puluh tahun tetapi terevaluasi kurang produktif menjalankan program Persyarikatan. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan turut menentukan terpilihnya kepemimpinan PP Muhammadiyah periode 2022-2027.

Keenam, darah muda dan segar. Aspek ini muncul dalam pernyataan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015 Din Syamsuddin. Kenginan ini bisa diterima Forum PWM karena adanya kekosongan jabatan Ketua. Di samping juga karena aspek kedua, ketiga, dan kelima. Darah muda dan segar bisa berasal dari figur yang selama ini aktif di Majelis atau tempat lain yang berdampak positif bagi program Persyarikatan.

Beberapa aspek di atas itulah yang turut menentukan terpilihnya komposisi PP Muhammadiyah periode 2022-2027. Mana aspek keinginan di atas yang menjadi dasar utama para pemilih. Kita tunggu sampai 20 November nanti. □-d

*) **Achmad Jainuri**, Wakil Ketua PWM Jawa Timur

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini-kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Saatnya Mendekonstruksi Kepahlawanan

MEMPERINGATI Hari Pahlawan adalah upaya mengingat sosok-sosok luar biasa yang hidup di masa lampau untuk diproyeksikan dalam kehidupan sekarang dan masa akan datang. Kita berharap, dengan mengenang jasa-jasa dan kontribusi mereka untuk Bangsa Indonesia, kita dapat meneruskan apa-apa yang telah mereka perjuangkan, baik yang sudah selesai maupun belum selesai. Namun, persoalannya: bagaimana kita meneruskan perjuangan mereka? Apakah dengan menyalin sepenuhnya figur masa lalu itu ke masa sekarang? Sepertinya tidak demikian.

Cerita-cerita kepahlawanan dari masa lalu tidak langsung sepenuhnya relevan dengan kondisi yang kita hadapi sekarang. Sekarang perjuangan secara fisik bukan lagi tantangan yang mendesak untuk dilakukan. Jika pun ada yang disebut perang di negeri kita saat ini, itu bukanlah perang seperti dulu, melainkan perang gagasan atau perang ideologi. Agar narasi kepahlawanan (*heroism narratives*) menjadi relevan dengan kondisi yang kita hadapi sekarang, kita perlu mendekonstruksi gagasan tentang kepahlawanan.

Narasi Maskulin

Hingga 2022, sudah ada 200 orang yang ditetapkan sebagai tokoh pahlawan nasional. Yang terbaru, ada lima orang. †Soeharto Sastrosoeyoso, †Paku Alam VI, †Rubini Natawisastro, †Salahuddin bin Talabuddin dan †Ahmad Sanusi.

Melihat bagaimana seorang tokoh ditetapkan sebagai pahlawan nasional, kita akan menemukan narasi yang sangat maskulin tentang pahlawan. Dari 200 orang yang ditetapkan sebagai tokoh pahlawan nasional itu, hanya 14 orang yang merupakan tokoh perempuan. Artinya, hanya 7% dari keseluruhan jumlah pahlawan nasional yang merupakan perempuan. 93% lainnya adalah laki-laki.

Siti Murtiningsih

Ini komposisi sangat timpang.

Dari komposisi pahlawan nasional yang hampir seluruhnya laki-laki itu, seolah-olah ditanamkan dalam alam bawah sadar kita bahwa yang namanya pahlawan itu adalah sosok laki-laki yang tangguh, macho, dan pemberani-sifat-sifat yang dalam konteks masyarakat kita selalu diasosiasikan dengan maskulinitas. Bahkan beberapa tokoh perempuan sekalipun yang dipilih sebagai pahlawan juga dipertimbangkan karena sifat-sifat maskulinitasnya. Semisal, Cut Nyak Dhien dan Cut Nyak Meutia yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional karena memimpin pasukan gerilyawan Aceh melawan Belanda.

Hanya beberapa tokoh perempuan yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional tanpa asosiasi pada sifat maskulinitas. Semisal RA Kartini, Dewi Sartika, Nyai Ahmad Dahlan, Ruhana Kuddus yang ditetapkan sebagai pahlawan karena perannya sebagai penulis, jurnalis dan pendidik. Barangkali karena maskulinitas yang sangat kental mempengaruhi narasi kepahlawanan inilah, pemerintah Indonesia sangat sedikit mengangkat perempuan pahlawan. Jika menjadi pahlawan identik maskulin, tentu sedikit perempuan menjadi pahlawan.

Narasi Individualistik

Selain bercorak maskulin, narasi kepahlawanan kental tendensi individualis: bahwa pahlawan adalah sosok individu yang punya kekuatan luar biasa seperti manusia super (*superman* yang membantu orang-orang di sekitarnya. Narasi kepahlawanan yang individualistik

ini tidak cocok dengan semangat zaman sekarang yang lebih menekankan kolaborasi daripada kompetisi.

Karena itu, penting untuk juga mendekonstruksi narasi kepahlawanan yang individualistik menjadi narasi yang holistic. Bahwa menjadi pahlawan bukanlah capaian individual, melainkan hasil dari jalinan antara motivasi internal individu dan dukungan komunal. Sosok pahlawan yang dibutuhkan saat ini bukanlah seorang individu yang secara sendiri mampu menyelamatkan bumi dari krisis iklim sebab hal itu mustahil dilakukan. Melainkan sekelompok orang yang berkolaborasi dengan banyak kelompok orang lainnya dalam mewujudkan, misalnya, ekonomi hijau di seluruh dunia.

Dengan dua dekonstruksi atas narasi kepahlawanan itu, kita berharap dapat menemukan solusi untuk banyak persoalan kontemporer. Baik di level nasional ataupun global. □-d

*) **Dr Siti Murtiningsih**, Dekan Fakultas Filsafat UGM

Pojok KR

BPBD DIY minta seluruh komponen siap siaga hadapi bencana.

-- Antisipasi jangan sampai terlambat. ***

Antisipasi lonjakan wisatawan, cegah kemacetan.

-- Problem tahunan yang sulit terurai. ***

Perempuan garda terdepan pelestari budaya.

-- Laki-laki tak boleh ketinggalan.

Beraba

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik

Naskah dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com

0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Petugas Regsosek Sempat Ditolak

BEBERAPA waktu lalu warga secara serentak se-Indonesia disurvei untuk pelaksanaan survei registrasi sosial ekonomi (regsosek). Pelaksanaan survei selama sebulan mulai 15 Oktober - 14 November di tengah musim hujan yang terus mengguyur.

Cukup banyak kisah suka duka para relawan survei tersebut. Meski sebelumnya sudah diinfo oleh RT bahwa akan adanya survei namun tetap saja pelaksanaannya tidak sesuai ekpektasinya. Rumah tidak ada orang, tidak mau membukakan pintu dan lain, dialaminya.

Namun ada kisah sedih. Di daerah saya ada petugas

survei untuk Regsoses BPS yang tidak diterima warga. Padahal sebelumnya sudah ada informasi dari RT. Akhirnya, untuk ke lapangan akhirnya petugas survei harus didampingi RT dan RT-lah yang menjelaskan maksud dan tujuan tersebut. Tetapi mengapa warga enggan mendatangi petugas survei? Ternyata termakan berita hoaks mengenai survei abal-abal dan untuk menipu. Semoga ini menjadi pelajaran, siapa pun yang hendak ke bawah, harus melibatkan RT/RW. Karena mereka adalah orang yang paling tahu warganya. □-d

Aci, warga Kota Tegal

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussabada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustuti, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Eddy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)... Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)